

BERITA FOTO FRAKSI PKS DPR RI



PKS

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA



Berikan Layanan Ambulan Bagi Jenazah Covid 19

Tim Kesehatan Dr. Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PKS DPR RI yang juga Anggota DPR Dapil Banten memberikan layanan secara cuma-cuma fasilitas mobil ambulans untuk warga yang wafat akibat covid 19 baru-baru ini.

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA



Penolakan FPKS Terkait Hotel Untuk Tempat Isoman Anggota DPR

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini melakukan konferensi pers terkait penolakan Fraksi PKS terhadap digunakannya hotel sebagai tempat isolasi mandiri bagi anggota DPR, pada Kamis (29/07). Fraksi PKS mengusulkan fasilitas DPR seperti Wisma Kopo atau lainnya untuk tempat Isoman anggota DPR dan Warga.





Berikan Layanan Ambulan Bagi Jenazah Covid 19

Tim Kesehatan Dr. Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PKS DPR RI yang juga Anggota DPR Dapil Banten memberikan layanan secara cuma-cuma fasilitas mobil ambulan untuk warga yang wafat akibat covid 19 baru-baru ini.



Hj. Nevi Zuairina



Hadiri Agenda Pembinaan Wilayah Mulai dari Cabang Hingga Ranting



Agam (26/07) --- Anggota Legislative asal Sumatera Barat II dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, turut agenda DPP PKS melalui Badan Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara, untuk menyelesaikan pemenuhan struktur di Sumatera Barat dibentuk tingkat cabang atau kecamatan dan tingkat ranting atau kelurahan hingga 100 persen.

Pemenuhan struktur PKS di kecamatan dan kelurahan hingga 100 persen, menurut Nevi untuk wilayah Sumatera memang sangatlah berat. Tapi khusus untuk wilayah Sumatera Barat, ia sangat optimis bahwa pembentukan struktur hingga kelurahan yang oleh PKS disebut Dewan Pengurus

Ranting (DPRa) dapat di realisasikan sampai 100 persen.

"Bagi PKS, perjuangan di wilayah Sumatera memang sangat menantang, terutama dalam melengkapi infrastruktur kepengurusan hingga sampai desa atau kelurahan yang merupakan struktur terkecil PKS berdasarkan anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga PKS. Namun para anggota dan pengurus PKS di wilayah Sumatera Barat telah bertekad untuk melengkapi hingga 100 persen. Semua tindakan baik pergerakan sdm maupun alokasi anggaran akan di upayakan untuk melengkapi struktur ini", tutur Nevi.

Politisi PKS ini pada saat

bertemu dengan anggota PKS di kabupaten Agam, melakukan dialog dalam pencapaian target pemenuhan struktur ini. Nevi juga turut mendampingi struktur tingkat daerah pada pelantikan-pelantikan pengurus di tingkat cabang dan tingkat ranting.

Anggota DPR yang kini duduk di komisi VI ini mengatakan, PKS telah menata berdasarkan waktu. Untuk tahun 2021 ini, lanjutnya, menguatkan struktur internal, mulai dari perapihan SDM hingga melengkapi struktur kepengurusan menjadi prioritas utama.

Hj. Nevi Zuairina



Bagikan Sembako di Delapan Titik



Sumbar (30/07) --- Anggota Legislative dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, menginisiasi pembagian paket sembako di delapan daerah wilayah Sumatera Barat.

Pembagian ini dilakukan pekan ini ada yang dilakukan langsung dan ada yang dilakukan team nya yang sejak pemilu hingga sekarang terus melakukan pekerjaan sosial kemasyarakatan.

"Pembagian sembako ini bukan tanpa tujuan. Saya berharap, dengan adanya covid gelombang ke dua ini yang mengakibatkan sedikit banyak berpengaruh di kehidupan keluarga masyarakat Indonesia pada persoalan kebutuhan rumah tangga,

pembagian sembako minimal dapat menghibur masyarakat", tutur Nevi.

Daerah yang menjadi titik pembagian sembako pekan ini kata politisi PKS ini ada di Abu Nagari Limo koto bonjol, Air Meruap Kinali, Harau 50 kota, Latina payakumbuh, Guguk Panjang Bukittinggi, Batang Gasan Padang Pariaman dua lokasi, dan kota pariaman.

Menurut Nevi, masyarakat saat ini sudah cukup lelah pada kondisi pandemi yang hampir 2 tahun berlangsung. Hal ini dikarenakan, selain pada persoalan kesehatan langsung, juga merambah pada kehidupan sehari-hari baik dalam aktivitas pekerjaan, pendidikan hingga berwisata.

"Saya berusaha sekuatnya untuk bersama masyarakat, untuk mengurangi beban yang selama ini semakin hari semakin menantang akibat persoalan bangsa yang belum kunjung selesai. Kita semua berdoa, agar ujian dan cobaan yang menimpa seluruh rakyat Indonesia dapat di atasi", Ucap Nevi.

Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si.



Narasumber webinar tentang PAUD yang diselenggarakan DPC PKS Pasar Rebo

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Dr. Anis Byarwati sebagai narasumber dalam Webinar yang bertajuk: Solusi TK, PAUD dan TPA tetap Eksis di Masa Pandemi menyampaikan bahwa dampak pandemi tidak hanya menghantam sektor ekonomi, tetapi juga sector pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini. Beberapa orang tua terdampak dan ada yang tidak mendaftarkan anak-anak usia dini ke sekolah. Selama pandemi, masyarakat kehilangan pendapatan

sehingga berupaya mengurangi pembelanjaan dan pengeluaran, di sisi lain perusahaan mengurangi produksi barang dan melakukan PHK kepada karyawan sehingga pengangguran meningkat. Menurut Anis yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR R, pendidikan anak adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan negara yang seharusnya saling bekerjasama dalam melaksanakan

tanggungjawab tersebut.

Dalam kesempatan yang sama untuk mengupayakan agar lembaga PAUD tetap bisa eksis selama pandemi, Anis menyarankan beberapa solusi antara lain dengan melakukan pembelajaran kreatif jarak jauh, melengkapi sarana prasarana belajar, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dan mencari dana hibah guru dan BOP (Bantuan Operasional Sekolah).



Hadiri Talim Rutin Ustadzah se-Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

Pagi hari ini, Ahad, 31 Juli 2021, saya hadir dalam acara Talim Rutin Ustadzah se-Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini digagas oleh Forum Silaturahmi Majelis Ta'lim (FORSITMA) PKS Cakung, dengan menghadirkan 122 Ustadzah Majelis Ta'lim di 7 kelurahan se-Kecamatan

Cakung.

Pada pertemuan yang penuh kekeluargaan ini saya menyampaikan bahwa seluruh aktivitas kita adalah bentuk ibadah kita kepada Allah.

Termasuk tugas saya di Parlemen, juga harus bernilai ibadah kepada Allah.

Dalam kesempatan ini, saya

juga menyampaikan tentang peran strategis para Tokoh Ustadzah Majelis Talim, untuk bersama-sama berjuang memperbaiki negeri ini, dengan cara menyebarkan kebaikan, dan mengajak orang untuk berpartisipasi dalam mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang diridhai Allah SWT.



Menjadi narasumber Pelantikan Pengurus HMI cabang Sijunjung.

Padang (27/07) --- Anggota DPR Dapil Sumbar I dari Fraksi PKS, Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan menyempatkan hadir dan menjadi narasumber pada kegiatan Pelantikan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Sijunjung.

Hermanto meminta aktivis mahasiswa dan masyarakat mencermati patologi (penyakit) demokrasi.

"Patologi demokrasi itu antara lain politik uang, demagog dan high cost," ujar Hermanto.

Politik uang, jelasnya,

merupakan pembodohan rakyat, mematikan kaderisasi politik, merusak proses demokrasi dan menghasilkan kepemimpinan yang tidak berkualitas.

Biaya politik mahal yang memunculkan politik transaksional menumbuhkan korupsi dimana anggaran pembangunan diambil untuk mengembalikan utang kampanye," tutur legislator dari FPKS DPR ini.

Penyakit demokrasi berikutnya adalah demagog yaitu pencitraan yang tidak substantif yang kerap membohongi dan menipu atau bersifat fatamorgana semu.

"Selanjutnya pemimpin yang tidak didukung dengan kualitas, kapasitas dan kapabilitas.

Cenderung hoak dimana membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar," tutur Hermanto.

Jangan terperangah dengan pencitraan. "Pencitraan itu bayangan, bukan sesungguhnya," tambah Hermanto.

High cost demokrasi merupakan penyakit. Kerap kali menutup peluang pemimpin berkualitas dan berintegritas untuk muncul karena biaya tinggi yang cenderung bersifat transaksional.

Dr. Hermanto, S.E., M.M



Serahkan Alsintan saat Reses di Dapil

Kabupaten Pesisir Selatan (30/07) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan, Kamis (29/7), menyerahkan alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan Pemerintah kepada petani di Kabupaten Pesisir Selatan. Dua hari yang lalu alsintan juga diserahkan kepada petani di Kota Sawahlunto.

"Alsintan ini aset negara yang diserahkan pengelolaannya kepada kelompok tani. Kelola amanah negara ini dengan sebaik-baiknya," demikian pesan Hermanto dalam sambutannya sebelum penyerahan alsintan.

Setelah alsintan dipakai, kata-

nya, langsung dibersihkan kembali.

"Kalau ada kerusakan langsung diperbaiki. Kalau ada suku cadangnya yang rusak, langsung diganti. Jangan tunggu sampai rusak parah," papar legislator dari FPKS DPR ini.

"Bila dirawat dengan baik tentu alsintan ini akan memberikan kemanfaatan yang lama," tambah Hermanto.

Kepada para ketua kelompok tani, Hermanto berpesan agar berla-ku adil dalam penggunaan alsintan.

"Alsintan ini jangan digunakan sendiri oleh ketua kelompok. Atur jadwalnya sehingga semua anggota kelompok bisa ikut memanfaatkannya," pungkas Hermanto.

Pada penyerahan bantuan di



Kabupaten Pesisir Selatan, Hermanto didampingi oleh 2 Anggota DPRD Pesisir Selatan Feby Rifli dan Yusman, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Nuzirwan dan 2 tokoh setempat Efrianto dan Eko Kurniawan.

Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag.



Hadiri Ulang Tahun Lalampa Toboli

Kabupaten Parigi Moutong (28/07) – Warga di Desa Toboli Kecamatan Parigi Utara Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di sepanjang deretan penjual lalampa Toboli, tidak menyangka dengan kehadiran Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sakinah Aljufri.

Kehadiran Anggota DPR RI yang duduk di Komisi X tersebut, khusus untuk menghadiri Ulang tahun ke-3 Lalampa Toboli, yang dihadiri Camat, Kepala Desa dan perangkat-perangkatnya, serta para tokoh masyarakat.

“Warga antusias dengan kehadiran kami, Alhamdulillah. Bagi kami, ini dilakukan bukan hanya semata-mata karena kami adalah

wakil mereka di lembaga legislatif, tetapi juga merupakan bagian dari silaturahmi. Sebab kata Nabi kita, Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, silaturahmi itu bisa memanjangkan umur dan memperbanyak rezeki,” kata Sakinah, dalam rilis resminya, Selasa (27/07).

Antusiasme warga menyambut kedatangannya, membuat Sakinah merasa terharu. Apalagi kedatangannya menghadiri ulang tahun lalampa Toboli, yang walaupun digelar secara sederhana, namun khidmat tersebut, sekaligus membagikan untuk masyarakat setempat guna mencegah penulran Covid-19.



Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag



Bantu Warga Miskin Terdampak Pandemi di Hantara Palu Utara

Palu (29/07) --- Politik Perempuan PKS asal Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri memberikan bantuan beras kepada masyarakat penyintas bencana alam 2018 yang masih menghuni Hunian Sementara (Hantara) Tapia Palu Utara.

Pemberian beras ini dilakukan Sakinah dalam rangkaian kegiatan anggota dewan di masa Reses, Ahad, (25/07/2021).

Sakinah mengatakan bahwa bantuan beras ini diberikan kepada penghuni huntara karena kondisi ekonomi masyarakat khususnya penghuni huntara pada masa pandemi Covid-19 saat ini sangat membutuhkan bantuan.

"Bencana gempa, tsunami dan likuifaksi tiga tahun silam yang menimpa kita, sampai saat ini masih menyisakan kepedihan. Terlebih lagi saat ini kita dihadapkan dengan pandemi Covid-19, semua aspek kehidupan terdampak tak terkecuali ekonomi masyarakat," tutur sekretaris jendral Wanita Islam Al-Khairaat.

Politik perempuan yang energik ini pun berharap agar bantuan ini dapat sedikit membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang sedang menghuni huntara dan terdampak pandemi Covid-19.

"Mudah-mudahan bantuan



beras ini mampu meringankan sedikit beban ekonomi kita dan saya mendoakan agar semua penghuni huntara ini segera mendapatkan hunian tetap dan dapat hidup normal kembali," pungkasnya.

H. Alifudin, S.E.,M.M.



PKS



Berikan Bantuan Tabung Oksigen ke Satgas Covid 19 PKS Kalbar



Pontianak (28/07) --- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Alifudin turut melakukan aksi solidaritas di masa Pandemi Covid 19, dengan memberikan bantuan tabung oksigen dan uang operasional kepada Tim Satgas Covid 19 DPW PKS Kalimantan Barat.

"Alhamdulillah wa syukurillah, dengan mengucap bismillah, Insya Allah bantuan ini dapat bermanfaat untuk kita semua" Ucap Alifudin di Kantor DPTW PKS Kalimantan Barat, (26/07/2021).

Pemberian Bantuan tersebut diselenggarakan secara simbolik di Kantor DPTW PKS Kalimantan Barat, Jalan Danau Sentarum, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Turut hadir serta Ketua DPW

PKS Kalimantan Barat, Bapak Arif Joni Prasetyo, Ketua DPD Pontianak, Bapak Husin dan Ketua DPD Kubu Raya, Bapak M. Salahuddin.

"Jadikan masa Pandemi ini sebagai ladang amal ibadah membantu sesama, dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, serta selalu mengawal kebijakan pemerintah yang tidak sesuai keinginan Masyarakat" tutup Alifudin.

Arif Joni, ketua DPW PKS Kalbar juga mengucapkan "terima kasih atas bantuan yang diberikan Alifudin, sehingga bisa menambah peralatan yang akan di pakai oleh tim Satgas covid 19 PKS Kalbar dalam membantu warga yang terjangkit virus corona"

Yon Kusnedi selaku ketua

Satgas Covid-19 PKS Kalbar menuturkan, bahwa kami terbentuk sejak tahun 2020, secara struktur satgas Covid 19 PKS Kalbar berada di 14 kabupaten dan kota se Kalbar, dengan memaksimalkan kantor DPD setempat sebagai Pusat Pelayanan dan penguasaan.

"Total dana sudah lebih dari 1 Miliar Rupiah, PKS Kalbar salurkan untuk membantu warga mulai dari tim disinfektan, bantuan sembako dan suplemen warga isoman, APD dan multivitamin untuk nakes, ambulance khusus untuk pasien covid, edukasi terkait covid dan vaksin baik offline maupun online, donor plasma darah, oksigen gratis" Ucap Yon Kusnedi.

H. Ahmad Syaikh



Membagikan Masker saat Kundapil

Purwakarta (28/07) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikh memberikan bantuan masker kepada masyarakat di Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Tiga wilayah ini merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Barat yang mengantarkan Syaikh ke Gedung Parlemen di Senayan.

Syaikh menuturkan, masker menjadi alat medis yang wajib dimiliki saat Pandemi Covid-19. Sebab, masker dapat mengurangi bahkan mencegah orang terpapar Covid-19.

"Masker ini sudah jadi kewajiban. Dimanapun kita, terutama saat di luar dan bertemu orang lain, wajib memakai masker,"

ujar Syaikh.

Presiden PKS itu berharap, masker yang diberikan dapat bermanfaat sehingga masyarakat terhindar dari Virus Corona.

"Ini ikhtiar dunia. Semoga kita terhindar dari bahaya Virus Corona," harap Syaikh.

Menurut Syaikh, situasi Pandemi Covid-19 saat ini sangat mengkhawatirkan. Untuk itu, Syaikh mengajak semua pihak menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun dan rajin mencuci tangan.

"Pandemi Covid-19 ini sudah mengkhawatirkan. Kita harus disiplin dengan protokol kesehatan," tegas Syaikh.



Salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi Sumarsono memberikan apresiasi atas bantuan masker tersebut.

"Ini bagus sekali. Karena masih banyak masyarakat yang tidak mampu membeli masker di tengah kondisi sulit saat ini," ungkapnya.



Program pendampingan Ibu Berdaya



Jakarta (27/07) --- Presiden Jokowi resmi memperpanjang status PPKM Darurat Jawa-Bali per tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus 2021, yang artinya PPKM darurat kemudian PPKM level 4 akan berlangsung selama sebulan.

Perpanjangan masa berlaku PPKM adalah sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menekan laju pandemik Covid-19 yang saat ini menyentuh angka 3,13 juta kasus aktif dengan 82.013 orang yang meninggal dunia.

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet mengutarakan keprihatinannya karena hampir semua sektor terimbas oleh

pandemi yang belum bisa diprediksi kapan berakhirnya.

"Pemerintah harus menjamin kebutuhan dasar masyarakat seperti ketersediaan pangan sampai pada level keluarga," tegas Slamet di Jakarta, Selasa (27/07/2021)

Pemerintah tidak boleh hanya menggunakan parameter-parameter makro untuk mengukur keberhasilan penanganan pandemik, akan tetapi parameter mikro khususnya pada level keluarga harus mendapatkan perhatian serius.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2021 menunjukkan bahwa pengangguran di Indonesia naik dari

4,9 persen menjadi 7 persen atau 9,7 juta orang. Selain itu tinggi kasus bunuh diri akibat terjerat utang pinjaman online dan bank keliling menjadi symptom bahwa ada penanganan pandemik belum sampai pada level mikro atau tatanan keluarga.

Perlu kolaborasi antar semua elemen untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Di Sukabumi kami mengembangkan program Ibu Berdaya sebagai upaya strategis untuk mengatasi persoalan ekonomi sampai pada tingkat terkecil yaitu keluarga," imbuhnya.

Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A.



Rapat Konsinyering Anggota Komisi VIII DPR RI dengan Mitra Kerja



Bogor – Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A dalam Rapat Konsinyering Anggota Komisi VIII DPR RI dengan Mitra Kerja di Wisma DPR RI, Cikopo, Rabu (9/6), Nur Azizah mendorong agar fungsi penyuluh sosial yang ada di bawah Kementerian Sosial dapat bersinergi dengan Penyuluh Agama dari Kementerian Agama. Menurut Nur Azizah hal itu perlu dilakukan agar proses penyuluhan di masyarakat dapat berjalan secara efektif dan saling beriringan dan tidak terjadi tumpang tindih secara muatan materi yang disampaikan.

“Terkait penyuluh sosial ini, saya ingin tahu seperti apa materi atau kurikulum dari penyuluhan

sosial yang dilakukan oleh pihak kemensos di Masyarakat. Kemudian, dasar pertimbangan dari dibuatnya kurikulum tersebut apa. Menurut hemat saya, ada baiknya jika ada sinergi dengan penyuluh agama yang saat ini sudah ada dari Kemenag, agar dapat saling berjalan beriringan, karena rakyat Indonesia pada dasarnya semua adalah umat beragama, tidak boleh dipisahkan. Dalam materi-materi penyuluh agama juga mencakup didalamnya nilai-nilai perbaikan moral dan sosial masyarakat, yang dalam prakteknya sejalan dengan tugas-tugas para penyuluh sosial”, papar Nur Azizah.

Hal itu turut didukung oleh Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si. selaku

wakil ketua komisi VIII DPR RI, menurutnya usul Nur Azizah tentang adanya sinergi antara penyuluh sosial dan penyuluh agama itu akan mengaktifkan peran para penyuluh di masyarakat, baik penyuluh agama maupun penyuluh sosial. “Sebelumnya kita rapat dengan Kemenag juga membahas tugas penyuluh agama ini. Mungkin bisa menjadi masukan bagi Kemensos kedepannya bisa berkolaborasi dengan Kemenag”, terang Diah Pitaloka.

Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A.



Kunker ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kabupaten Cianjur

Bogor – Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A dalam Rapat Konsinyering Anggota Komisi VIII DPR RI dengan Mitra Kerja di Wisma DPR RI, Cikopo, Rabu (9/6), Nur Azizah mendorong agar fungsi penyuluhan sosial yang ada di bawah Kementerian Sosial dapat bersinergi dengan Penyuluh Agama dari Kementerian Agama. Menurut Nur Azizah hal itu perlu dilakukan agar proses penyuluhan di masyarakat dapat berjalan secara efektif dan saling beriringan dan tidak terjadi tumpang tindih secara muatan materi yang disampaikan.

“Terkait penyuluh sosial ini, saya ingin tahu seperti apa materi atau kurikulum dari penyuluhan

sosial yang dilakukan oleh pihak kemensos di Masyarakat. Kemudian, dasar pertimbangan dari dibuatnya kurikulum tersebut apa. Menurut hemat saya, ada baiknya jika ada sinergi dengan penyuluh agama yang saat ini sudah ada dari Kemenag, agar dapat saling berjalan beriringan, karena rakyat Indonesia pada dasarnya semua adalah umat beragama, tidak boleh dipisahkan. Dalam materi-materi penyuluh agama juga mencakup didalamnya nilai-nilai perbaikan moral dan sosial masyarakat, yang dalam prakteknya sejalan dengan tugas-tugas para penyuluh sosial”, papar Nur Azizah.

Hal itu turut didukung oleh Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si. selaku

wakil ketua komisi VIII DPR RI, menurutnya usul Nur Azizah tentang adanya sinergi antara penyuluh sosial dan penyuluh agama itu akan mengaktifkan peran para penyuluh di masyarakat, baik penyuluh agama maupun penyuluh sosial. “Sebelumnya kita rapat dengan Kemenag juga membahas tugas penyuluh agama ini. Mungkin kita bisa menjadi masukan bagi Kemensos kedepannya bisa berkolaborasi dengan Kemenag”, terang Diah Pitaloka.

Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A.



RDP Komisi VIII DPR dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A. dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada Senin (14/6) di Ruang Rapat Anggota Komisi VIII, Gedung Nusantara II DPR RI, Nur Azizah mempertanyakan terkait Visi dan Misi BPJPH di program tahun 2021 yang turut mencantumkan program kerukunan umat beragama dan layanan kehidupan beragama. Menurutnya, hal itu kurang relevan dilakukan oleh BPJPH, karena itu sudah menjadi domain Bimas Islam, Kemenag.

Sehingga menurutnya, BPJPH harus serius pada kinerja utamanya

sebagai Badan yang melakukan sertifikasi halal bagi produk yang dikonsumsi dan digunakan orang Indonesia khususnya umat muslim Indonesia. Hal ini penting difokuskan karena Islam punya aturan yang ketat masalah produk halal. BPJPH tidak perlu mengurusi program kerukunan umat beragama serta layanan kehidupan beragama karena itu sudah ada domainnya masing-masing di Kemenag.

"Seharusnya itu adalah domain dari Bimas Islam di Kemenag. Sehingga tidak perlu diurus oleh BPJPH. Karena Islam itu berbeda dengan agama-agama yang lain terkait penentuan produk halal dan haram. Dalam menyembelih hewan

saja di Islam itu harus karena Allah. Sehingga diharamkan sembelihan yang tidak atas nama Allah. Itu jelas di Islam, padahal agama-agama lain tidak mengharuskan hal tersebut. Ada yang cukup di cekik, ditanduk dan lain sebagainya, itu menjadi tidak halal jika dikonsumsi umat Islam, karena di Islam sudah memiliki prosedur sendiri dalam kaidah penyembelihan hewan. Terhadap produk non konsumsi pun ada prosedur sertifikasi halalnya. Dalam perkembangannya konsumen non muslim di dunia pun juga banyak memilih produk konsumsi dan non konsumsi bersertifikat halal.

Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A.



Serap Aspirasi Pedagang Pasar dan Majelis Taklim

Depok – Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A. sebutkan bahwa peningkatan kasus positif Covid serta penerapan PPKM Darurat yang di perpanjang hingga 25 Juli telah melumpuhkan banyak sektor. Tidak terkecuali sektor Ekonomi dan Pendidikan. “Para pedagang kecil yang umumnya mengandalkan penghasilan harian, dengan diberlakukannya PPKM Darurat ini terkena imbasnya, karena pembatasan membuat mereka harus berhenti berdagang”, ungkap Nur Azizah.

Dalam rangkaian reses Anggota DPR RI Masa Persidangan V tahun 2020-2021, Nur Azizah bertemu dan menyerap aspirasi para

pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Depok serta perwakilan pengurus Majelis Taklim di Kota Depok. Kegiatan yang di gelar di kediaman Furqon, salah satu pengurus APPSI di Palsigunung, Kelurahan Tugu, Cimanggis – Depok pada Sabtu (17/7).

Pada kesempatan ini Nur Azizah turut membagikan sembako untuk para pedagang kecil yang terdampak Covid-19, serta para pembina Majelis taklim yang ada di dalam lingkungan Pasar Pal, Tugu, Depok. Nur Azizah menambahkan, selain efek dari Covid berimbas pada pendapatan para pedagang kecil, para pembina majelis taklim juga merasakannya.



Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A.



Nur Azizah Bagikan Sembako Untuk Warga Terdampak Covid

Depok – Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A, berikan santunan bagi warga terdampak Covid di Kota Depok pada Sabtu (17/7). Kegiatan santunan berupa pemberian paket sembako ini dilakukan dalam rangkaian Agenda Reses Anggota DPR RI Masa Persidangan ke V tahun 2020-2021. Pada kesempatan ini Nur Azizah membagikan total 80 sembako berisi beras, minyak goreng dan telur guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kecil di wilayah Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis – Kota Depok.

Pada kesempatan ini, Nur Azizah turut menitipkan pesan singkat, saat ini terdapat beberapa varian baru dari Covid-19 yang

penyebarannya begitu cepat dan massif, untuk itu masyarakat diminta untuk tidak panik, tetap tenang namun harus tetap memperketat protokol kesehatan.

“Karena Covid saat ini begitu cepat penularannya khususnya di kota Depok, yang bersebelahan dengan ibu kota. Kita harus lebih memperketat protokol kesehatan, namun jangan panik berlebihan, tetap tenang, agar imunitas tetap terjaga. Dan jangan lupa bahwa sebagaimana arahan pemerintah, agar masyarakat mengenakan dua lapis masker setiap kali akan beraktivitas yang mengharuskan keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain”, papar Nur Azizah.



Habib Aboe Bakar Alhabsyi, S.E



**Memantau
kegiatan
vaksinasi
Covid 19 di
kantor DPP PKS**

Jakarta -- Sekretaris Jendral DPP PKS / Anggota FPKS DPR RI Komisi III Habib Aboe Bakar Al Habsyi memantau kegiatan vaksinasi Covid 19 di kantor DPP PKS, Jl. Tb. Simatupang, Jakarta Selatan, Jum'at (30/07/2021)

Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.



Silaturahmi dengan Forum Betawi Rempug (FBR)



Jakarta (30/07) --- Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II yang juga Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, saat reses menjumpai salah satu Ormas yang aktif di lingkungan masyarakat Betawi, yaitu Forum Betawi Rempug (FBR), dan mengajak agar FBR juga ikut membantu rakyat dalam mengatasi pandemi Covid-19.

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa Covid-19 benar-benar ada dan sudah banyak menimbulkan korban jiwa maupun non jiwa di Jakarta khususnya, maupun di Indonesia umumnya, sehingga sudah seyakinya apabila FBR juga membantu sesama Rakyat Indonesia dan bersama seluruh

komponen masyarakat mewaspadai bahaya virus tersebut dengan terus tetap mengikuti berbagai anjuran baik dari Pemerintah maupun dari para Ulama untuk sehat dan selamat dari virus covid-19 termasuk dengan varian delta nya.

"Saya sekaligus juga mengingatkan Pemerintah soal kewajiban Pemerintah melindungi seluruh Rakyat Indonesia dari Covid-19 dan semua dampaknya," ungkapnya.

Hal ini disampaikan HNW dalam kegiatan reses DPR RI bersama FBR yang dikemas dalam kegiatan tahlil dan doa untuk Jakarta terbebas dari Covid-19 bersama dengan Forum Betawi Rempug (FBR) se-Jabodebatek Gardu 096 di

Mangga Besar, Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (29/07/2021).

HNW mengatakan bahwa FBR sebagai Forumnya Warga Betawi tentunya mendukung budaya Indonesia, termasuk budaya Betawi, yang mengedepankan gotong royong dan bekerja sama untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat.

"Apakah itu masalah yang terlihat kasat mata seperti masalah Narkoba, Miras, Tawuran dan lainnya, juga yang tidak terlihat kasat mata, seperti Covid-19 ini. Penting kita bergotong-royong, bersama-sama mengatasinya," ujarnya.



Narasumber pada Webinar LPDP

Lampung (31/07) --- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Junaidi Auly mengatakan harapannya kepada masyarakat Lampung khususnya di Tulang Bawang untuk mengambil manfaat dari beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Demi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat (SDM).

Hal itu ia ungkapkan dalam Webinar Sosialisasi Tugas dan Fungsi LPDP dengan tema Kupas Tuntas Beasiswa LPDP: Strategi Sukses Meraih Beasiswa Magister dan Doktoral. Kegiatan tersebut terselenggara antara Universitas Megou Pak Tulang Bawang dengan LPDP pada Sabtu, (31/07)

"Semoga sosialisasi ini dapat meningkatkan alternatif akses beasiswa bagi mahasiswa dan dosen dan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap bangsa dan negara," ujar Junaidi.

Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ini menuturkan sebagaimana UU nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa salah satu tujuan pendidikan tinggi diantaranya untuk menghasilkan lulusan yang menguasai IPTEK demi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa, karenanya pemerintah dan DPR terus berupaya meningkatkan pemerataan, akses, dan keterjangkauan biaya pendidikan

tinggi.

Lebih lanjut, Aleg Fraksi PKS dari Dapil Lampung II ini berharap LPDP agar terus hadir dan memperhatikan tingkat pemerataan informasi beasiswa karena pendidikan tinggi bagi sebagian masyarakat kita masih tergolong kebutuhan yang mahal.

"Karenaanya, kami berharap peserta yang hadir bisa ambil momen ini dan memanfaatkan peluang program beasiswa dari LPDP dan semoga ada peningkatan pemanfaatan beasiswa LPDP oleh mahasiswa Lampung khususnya di Tulang Bawang," tutup Junaidi.

H. Johan Rosihan, S.T.



Kunjungi Balai Karantina Pertanian di Dapil,



Mataram (31/07) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan mengunjungi Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram, Kamis (29/07/2021).

Kedatangannya itu sebagai bentuk silaturahmi dan membangun kolaborasi sebagai Anggota Komisi IV yang salah satu mitranya adalah Kementerian Pertanian.

Dalam kunjungan perdananya ini, Johan mengapresiasi kinerja Balai Karantina Pertanian yang selalu berusaha membangun koordinasi dan kolaborasi dengan banyak pihak demi mendukung peningkatan laju produktifitas produk pertanian di NTB terutama Pulau Lombok.

Johan terkejut mendengar presentase Kepala Balai Karantina Pertanian, Ali Siregar yang dalam beberapa tahun terakhir tengah membangun komunikasi dengan banyak pihak demi mendorong gairah ekspor di NTB.

"Saya sangat mengapresiasi kinerja Balai Karantina Pertanian selama ini. Untuk itu, sebagai Anggota Komisi IV yang salah satu mitranya adalah Kementerian Pertanian, saya siap mendukung dan bersinergi." Ungkap Johan di hadapan keluarga besar balai karantina.

Seperti kita ketahui, lanjut Johan, potensi pertanian kita di NTB ini sangat besar. Kalau di Lombok

ada bawang putih, kopi, vanili, dan burung walet, maka di Sumbawa juga ada jagung dan masih banyak lagi.

"Saya berjanji kepada teman teman balai karantina bahwa kedepan akan sering menyuarakan potensi kita ini di DPR agar bisa menjadi perhatian bersama, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun Kabupaten/Kota." Tambah Politisi asal Sumbawa itu.

Rencananya, Johan dalam waktu dekat bersama teman teman balai karantina pertanian juga akan meninjau langsung potensi lahan vanili milik petani lokal di Sembalun, Lombok Timur.

Dr. H. Mardani, M.Eng



PKS



Memantau Pelaksanaan vaksinasi di DPC PKS Kramat Jati

Jakarta -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan DKI Jakarta I Mardani Ali Sera memantau langsung pelaksanaan vaksinasi bertema "Vaksinasi Merdeka 2021" di DPC PKS Kramat Jati Jakarta Timur, pada Ahad 1 Agustus 2021.





Silaturahmi dengan Ormas Bang Japar

Jakarta -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan DKI Jakarta I Mardani Ali Sera bersilaturahmi dengan Organisasi Masyarakat Kebangkitan Jawa dan Pengacara (Bang Japar) atau yang lebih dikenal Ormas Bang Japar pada Ahad 1 Agustus 2021.

Dr. H. Mardani, M.Eng



Memberi Bantuan Masker

Jakarta -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan DKI Jakarta I Mardani Ali Sera Memberi bantuan masker ke RW 05 Kelurahan Seru Kecamatan Cipayang Jakarta Timur. pada Ahad 1 Agustus 2021.





Bantuan Paket Sembako di Kota Tangsel

Jakarta -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan Banten II Mulyanto menyalurkan 1000 paket sembako di 3 wilayah Kota Tangsel dan Kabupaten Tangerang pada Ahad 1 Agustus 2021.



Hari Aspirasi



Menerima Aspirasi serikat pekerja PLN Persero, SPPJB, dan PPIP

Jakarta (3/08)—Kapoksi FPKS Komisi VI Amin Ak menghadiri hari aspirasi mengenai holdingisasi PLTP dan PLTU, yang disampaikan oleh 3 serikat pekerja yaitu PLN Persero, SPPJB, serta PPIP. Dalam aspirasi ini, ketiga serikat tersebut menolak holdingisasi jika induknya adalah Pertamina.

"Bicara soal kewenangan memang di poksi VI, karena memang di bawah kementerian BUMN. Terima kasih atas penyampaian aspirasinya. Suara kami juga lantang, sehingga akan kami kritisi." Respons Amin.

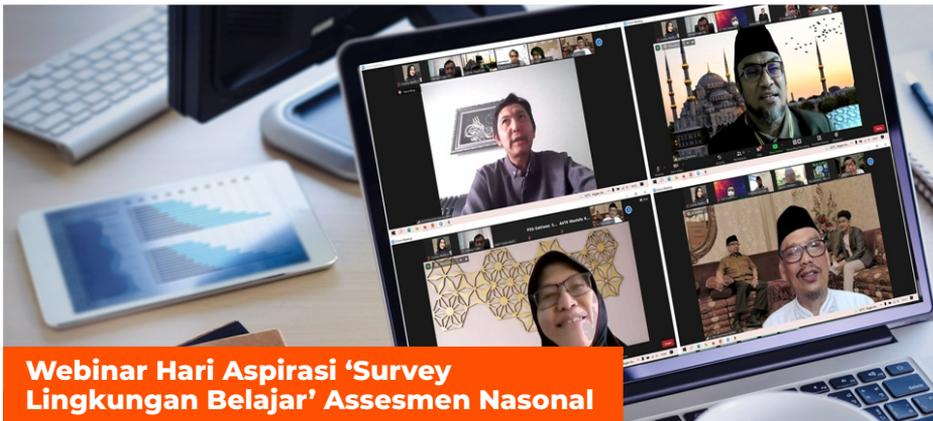
Selain Amin, Nevi Zuairina Komisi VI dan Mulyanto Komisi VII juga menghadiri hari aspirasi.

Mulyanto menanggapi bahwa sebenarnya yang dipersoalkan oleh teman-teman serikat bukanlah holdingisasi, melainkan ketua atau induknya. FPKS dalam hal ini akan terus mengkaji dan mencoba melakukan renegotiasasi kembali. Ada banyak permasalahan yang membuat kelistrikan ini jadi berputar-putar, termasuk permasalahan orang yang mengatur dibalikny.

"Fraksi PKS sebagai sebuah institusi yang melayani rakyat pasti akan menyuarakan hal ini. Mendengar paparan-paparan tadi, tentu kami akan menyampaikan sikap, berdasarkan kajian objektif dan konstitusi" Ujar Amin.

Sebelumnya, serikat pekerja mengatakan bahwa akan terjadi holdingisasi PLTP yang induknya adalah Geotermal Pertamina. Hal ini jelas melawan putusan MK tahun 2004 dan 2016 tentang tenaga listrik, di mana seharusnya PLN lah yang menjadi induk holding. Merespons hal ini, Nevi Zuairina juga mengatakan akan mencari solusi dalam permasalahan yang sudah seperti benang kusut ini.

"Akan aneh kalau holding PLTP tapi di bawah Pertamina. Pertamina itu untuk gas dan minyak bumi, bukan listrik. Kepemilikan ini pada akhirnya akan bertentangan dengan konstitusi dan putusan MK" Ucap Andy selaku perwakilan dari PPIP.



Webinar Hari Aspirasi 'Survey Lingkungan Belajar' Asesmen Nasional

Jakarta (03/08) --- Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menghadiri aspirasi terkait Survey Lingkungan Belajar yang menuai kontroversi.

Kegiatan ini dihadiri lembaga pendidikan yakni PP Muhammadiyah, P2G (Perhimpunan Pendidikan dan Guru) dan Komunitas Sekolah.

"Oleh karenanya saya kira, yang tau tentang lapangan tentu Bapak Ibu sebagai penyelenggara pendidikan khususnya dan juga yang langsung interaksi dan bahkan sedang masih bergelut di dunia pendidikan, khususnya tentang Asesmen Nasional," ujar Abdul Fikri Faqih dalam webinar Hari Aspirasi 'Survey Lingkungan Belajar'

Assesmen Nasional, Selasa (03/08).

Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Abdulah Mukti mengatakan, kebijakan yang didirikan oleh kementerian ini begitu kontroversi. Misalnya, dalam kebijakan pendidikan seyogyanya bisa fokus pada Covid-19, namun nyatanya hanya bisa memberikan fasilitas sebatas kuota internet.

"Sementara daerah-daerah dari Banten hingga Papua, itu beraneka ragam kondisinya. Ada yang tidak terkoneksi dengan internet," ujarnya.

Dengan itu, PP Muhammadiyah memberi masukan. Survey Lingkungan Belajar harus dicabut, lebih baik fokus pada aspek kondisi lingkungan di sekolah daripada

menghamburkan label program.

Lembaga pendidikan lain seperti P2G dan Komunitas Sekolah juga sepakat atas insi masuk dari PP Muhammadiyah, yakni pembatalan Asesmen Nasional. Begitu banyak masalah-masalah lain yang perlu difokuskan misalnya, pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir dan masih perlu dibenahi.

Anggota Dapil Jawa Barat V, Fahmy Alaydroes turut memberikan tanggapan terkait masukan yang telah di tuturkan oleh empat lembaga tersebut. Menurutnya, perlu sikap serius untuk terus mengawal kebijakan pendidikan nasional bangsa yang saat ini cukup 'gaduh'.

Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen



Kunjungi
**KANAL RESMI
FRAKSI PKS DPR RI**

fraksi.pks.id



Website

fraksi.pks.id



Instagram

fraksipksdprri



Twitter

@FPKSDPRRI



Facebook

FPKS DPR RI



Youtube

PKSTV DPR RI



Spotify

Fraksi PKS DPR RI